
PERSEPSI GURU TERHADAP IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM PEMBELAJARAN PAI DAN BUDI PEKERTI DI SEKOLAH DASAR

Zuhriyyah Hidayati¹, Nurdi²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Fattah Siman Lamongan, Indonesia

² Pengawas PAI Kemenag Lamongan, Indonesia

Pos-el : [zuhriyyahhidayati@gmail.com^{1\)}](mailto:zuhriyyahhidayati@gmail.com)

[nurdimade@gmail.com^{2\)}](mailto:nurdimade@gmail.com)

Received 20 February 2023; Received in revised form 03 March 2023; Accepted 16 Mei 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan persepsi guru PAI terhadap implementasi Kurikulum Merdeka dalam kegiatan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Sampel penelitian terdiri atas 21 orang guru PAI dan Budi Pekerti jenjang SD yang ada di Kecamatan Turi dengan teknik purposive sampling. Data tentang persepsi guru dijaring melalui kuesioner dan wawancara. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan (85,7%) menyetujui adanya implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah serta mengakui tentang kelebihan yang terdapat dalam Kurikulum Merdeka, namun hanya sebagian (39,5%) dari partisipan yang mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep kunci dalam kegiatan pembelajaran secara konsisten. Hal ini disebabkan karena partisipan mengalami kesulitan dalam memahami capaian pembelajaran, menurunkan CP ke TP dan ATP, serta kesulitan dalam menyusun RPP/modul ajar, dan penilaian berdasarkan Kurikulum Merdeka. Kendala lainnya adalah tentang terbatasnya sarana dan prasarana serta kemampuan guru yang rendah dalam IT. Temuan ini mengindikasikan bahwa sosialisasi dan pelatihan tentang Kurikulum Merdeka saja belum cukup, tetapi perlu adanya program pendampingan yang konsisten terhadap guru-guru sehingga mereka dapat mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dalam proses belajar mengajar secara konsisten.

Kata kunci: Guru PAI SD, Implementasi Kurikulum Merdeka, Persepsi.

Abstract

This study aims to describe the perceptions of Islamic Religious Education teachers towards the implementation of the Kurikulum Merdeka in PAI dan Budi Pekerti learning activities. The method used is the descriptive method. Using a purposive sampling technique, the research sample consisted of 21 Islamic Religious Education teachers and Elementary School Budi Pekerti in Turi District. Data on teacher perceptions were collected through questionnaires and interviews. The data collected was then analyzed by descriptive analysis. The results showed that most of the participants (85.7%) agreed to the implementation of the Kurikulum Merdeka in schools and acknowledged the advantages contained in the Kurikulum Merdeka, but only some (39.5%) of the participants were able to understand and apply the key concepts in learning activities consistently. This is because participants experience difficulties understanding learning outcomes, reducing CP to TP and ATP, as well as difficulties in preparing lesson plans/modules, and assessments based on the Kurikulum Merdeka. Another obstacle is the limited facilities and infrastructure and teachers' low IT ability. These findings

indicate that socialization and training on the Kurikulum Merdeka alone are not enough, but there needs to be a consistent mentoring program for teachers so that they can implement the Kurikulum Merdeka in the teaching and learning process consistently.

Keywords: *Elementary Islamic Education Teachers, Implementation of Independent Curriculum, Perceptions.*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia pada awal tahun 2020 yang berlanjut hingga awal tahun 2022 membawa banyak perubahan. Di Indonesia, banyak dampak yang tersisa dari pandemi Covid-19, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang mendadak dialihkan dari pembelajaran konvensional tatap muka di sekolah menjadi pembelajaran jarak jauh dari rumah ternyata menyisakan berbagai macam permasalahan (Basar, 2021). Salah satu di antaranya adalah ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) pada ketercapaian kompetensi peserta didik (Cerelia, dkk, 2021) (Nugraha, 2022).

Untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) Pemerintah melalui Kemdikbudristek bersama kementerian lain mengupayakan berbagai layanan pemulihan pembelajaran dampak Pandemi Covid-19. Salah satu di antaranya adalah memberikan tiga opsi implementasi kurikulum pada satuan pendidikan, yakni pelaksanaan kurikulum 2013 secara penuh, menggunakan kurikulum darurat (yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Kemendikbudristek), dan penyederhanaan kurikulum secara mandiri (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020). Tercatat dalam laporan survei yang dilakukan BSKAP pada Juli 2021 bahwa ada 59,2% lembaga yang menggunakan kurikulum 2013 secara penuh, 31,5% menggunakan kurikulum darurat, dan 8,9% lembaga yang melakukan penyederhanaan kurikulum 2013 secara mandiri, serta terdapat 0,4% lembaga yang menggunakan kurikulum lainnya (BSKAP, 2022a).

Berdasar pada kajian akademik yang dilakukan Pemerintah, suatu kesimpulan diambil bahwa kurikulum darurat yang diterapkan satuan pendidikan pada masa pandemi Covid-19 adalah paling baik dilihat dari capaian belajar siswa dibandingkan dengan penggunaan kurikulum 2013 (BSKAP, 2022a). Di samping kajian tersebut, beberapa evaluasi dari kurikulum 2013 juga telah dilakukan dengan kesimpulan bahwa dibutuhkan kurikulum sederhana yang mudah diimplemetasikan, *decentralized*, dan fleksibel. Selanjutnya, pemerintah Indonesia melalui Kemdikbudristek mengambil langkah dengan memberi tiga opsi penggunaan kurikulum, yakni: Kurikulum 2013 secara penuh, kurikulum darurat, dan Kurikulum Merdeka (Papan Kemdikbudristek, 2021).

Dari ketiga opsi tersebut, perhatian Pemerintah pada penyiapan implementasi Kurikulum Merdeka di tahun 2021 dan tahun 2022 berfokus pada penyediaan support sistem. Melalui *pilot project* yang disebut sebagai Sekolah Penggerak,

implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dipercepat keterlaksanannya melalui pendampingan intensif oleh fasilitator sekolah penggerak juga sebagai program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila (Kepmendikbudristek No. 371/M/2021). Kendati demikian, pada praktik yang terjadi di lapangan tidak hanya sekolah penggerak saja yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Dalam hal ini, pemerintah daerah mendukung penuh ketercapaian pelaksanaan Kurikulum Merdeka melalui berbagai workshop, diklat, dan juga pelatihan baik untuk guru dan kepala sekolah maupun pada pengawas sekolah (<https://disdik.lamongankab.go.id/>).

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang berdasar pada filosofi merdeka belajar yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemerdekaan menurutnya adalah tujuan pendidikan yang sekaligus menjadi prinsip utama yang melandasi strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Kemerdekaan ini hanya bisa dicapai dengan pendidikan budi pekerti karena dengan budi pekerti inilah manusia dapat berdiri sebagai manusia yang beradab (Ainia, 2020).

Adapun enam prinsip utama dalam Kurikulum Merdeka adalah: 1) Sederhana, mudah dipahami, dan diimplementasikan; 2) Fokus pada kompetensi dan karakter semua peserta didik; 3) Fleksibel; 4) Selaras; 5) Bergotong royong; dan 6) Memperhatikan hasil kajian dan umpan balik. Dalam kerangkanya, Pemerintah menetapkan komponen Kurikulum Merdeka pada empat bagian besar, yakni: 1) Profil pelajar Pancasila; 2) Capaian Pembelajaran; 3) Struktur kurikulum; dan 4) Prinsip pembelajaran dan asesmen. Profil Pelajar Pancasila di sini merupakan sintesis dari Tujuan Pendidikan Nasional, visi pengembangan SDM yang termuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, Pancasila, serta pandangan para pendiri bangsa. Sedangkan tiga komponen lainnya merupakan turunan dari kebijakan Tujuan Pendidikan Nasional yang tertera dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 dan juga turunan dari Standar Nasional Pendidikan, khususnya Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Kerangka ini disusun sangat umum dan abstrak dan sifatnya lebih ke arah memandu dan bukan bersifat mengatur secara ketat (BSKAP, 2022a).

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, peran guru sangat bervariasi meliputi fasilitator pembelajaran merdeka belajar, guru inovatif dan kreatif, guru berkarakteristik, dan guru penggerak (Daga, 2022). Guru menjadi kunci keberhasilan implementasi merdeka belajar dengan menciptakan belajar yang merdeka supaya proses pembelajaran bisa membuat siswa lebih kreatif untuk menimba ilmu secara mendalam dimana menciptakan suasana yang membahagiakan (Pendi, 2020). Dengan begitu, diharapkan suasana pembelajaran akan lebih menyenangkan dan membuat anak nyaman serta bahagia juga. Pembelajaran tidak hanya terfokus pada mendengarkan penjelasan guru, nantinya peserta didik juga akan terbentuk karakter berani, mandiri, cerdas dalam bergaul,



dan berkompetensi, serta siswa tidak lagi fokus pada komptisi pada sistem perangkingan kelas (Yusuf dan Arfiansyah, 2021).

Di sisi yang lebih teknis, guru diharapkan mampu mengetahui perkembangan teknologi, serta harus mampu mengimplementasikan kurikulum yang selalu berubah (Yulianti, dkk, 2022). Guru harus mampu mengelola pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang ada dengan melakukan refleksi dan perbaikan terus menerus sehingga peserta didik terdorong untuk meningkatkan prestasi akademiknya secara mandiri (Sibagariang, D. , Sihotang, H. , & Murniarti, E., 2021).

Namun karena masih terbilang baru, banyak guru dan juga calon guru yang belum sepenuhnya memahami hakekat Kurikulum Merdeka. Penelitian Fitrotun dkk., (2020) menyebutkan bahwa calon guru PAI memahami Merdeka Belajar sebagai kebijakan yang hanya berisi tentang penghapusan UN serta konsep belajar tanpa dibebani oleh capaian skor. Guru juga mengalami pemahaman yang minim terhadap konsep Kurikulum Merdeka (Fatmiyati, 2022), kendati dalam sikap penerimaan, para guru ini hampir semua menyambut positif (Saputra, 2022).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan juga masih banyak yang berfokus pada konsep Merdeka Belajar yang dicetuskan sebelum disahkannya Kurikulum Merdeka. Fokus Merdeka Belajar pun hanya berkutat pada penyederhanaan RPP (Rahman, dkk., 2021) dan penghapusan UN. Ada penelitian lain memang dilakukan untuk meneliti tentang implementasi Kurikulum Merdeka, seperti penelitian yang dilakukan oleh Restu Rahayu, dkk. (2022) yang berfokus pada praktik implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah penggerak, dan Susiani (2022) yang memberikan fokus pada pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih guru PAI sekolah dasar negeri dan swasta yang ada di Kecamatan Turi terkait persepsi mereka terhadap implementasi Kurikulum Merdeka, terutama pada mata pelajaran PAI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan persepsi guru PAI terhadap implementasi Kurikulum Merdeka dalam kegiatan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Berdasar observasi awal dan wawancara peneliti dengan Pengawas Sekolah dan sebagaimana guru PAI tentang implementasi Kurikulum Merdeka pada SDN dan satu sekolah dasar swasta di Kecamatan Turi tercatat bahwa semua SDN dan satu sekolah dasar swasta telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara mandiri, dan hanya ada satu SDN yang terdaftar sebagai sekolah penggerak. Penelitian ini mencakup pemahaman guru tentang Kurikulum Merdeka, bagaimana penerapannya, serta faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan Kurikulum Merdeka mata pelajaran PAI di sekolah.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Populasi penelitian yaitu seluruh guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di sekolah dasar negeri dan swasta se-Kecamatan Turi. Sampel penelitian terdiri atas 21 orang guru. Data dalam

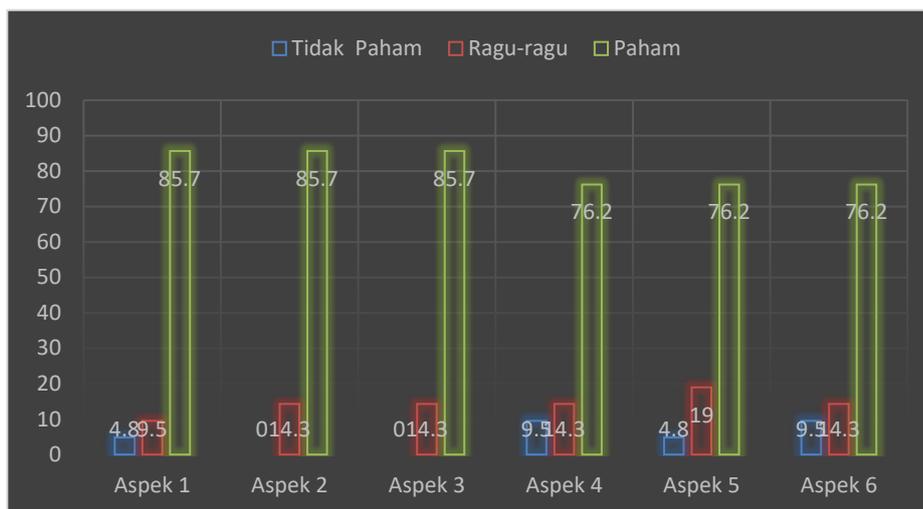
penelitian ini berupa persepsi guru tentang Kurikulum Merdeka yang terdiri atas persepsi guru terhadap hakikat Kurikulum Merdeka, implementasi Kurikulum Merdeka, serta kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Data-data tersebut dijangkau melalui kuesioner dan wawancara. Data yang telah dijangkau kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Guru Pendidikan Agama Islam tentang Kurikulum Merdeka

Persepsi guru tentang kurikulum 2013 (Gambar 1) menunjukkan bahwa sebagian besar guru (85,7%) memahami filosofi Kurikulum Merdeka, yakni tentang keniscayaan perubahan yang membawa pada perubahan kurikulum, sementara 9,5% menyatakan ragu-ragu atas pemahamannya, dan 4,8% menyatakan belum memahami hakekat Kurikulum Merdeka. Sebagian besar guru (85,5%) menyatakan kesetujuannya pada implementasi Kurikulum Merdeka, sedangkan hanya 14,3% guru yang menyatakan ragu-ragu atas pendapat mereka terhadap Kurikulum Merdeka. Pada aspek penetapan kebijakan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah, 87,5% guru menyatakan sekolah telah memberikan ketetapan pelaksanaan Kurikulum Merdeka, sementara 14,3% guru menyatakan ragu-ragu atas ketetapan kebijakan sekolah. Di samping itu, sebagian besar guru partisipan (76,2%) mengungkapkan bahwa mereka memahami aspek-aspek yang berubah dari Kurikulum 2013 pada Kurikulum Merdeka, sedangkan terdapat 4,3% guru menyatakan ragu-ragu pada pemahaman mereka atas perubahan dalam Kurikulum Merdeka, dan 9,5% guru menyatakan tidak memahami perubahan dalam Kurikulum Merdeka. Dalam aspek pemahaman guru terhadap peran Kurikulum Merdeka terhadap minat belajar siswa, terdapat 76,2% menyatakan paham akan peran tersebut, sedangkan 19% menyatakan ragu-ragu, dan 4,8% menyatakan ketidakpahamannya. Aspek terakhir dalam pemahaman Kurikulum Merdeka adalah pemahaman guru atas peran Kurikulum Merdeka terhadap kompetensi siswa Abad 21. Terdapat 76,2% menyatakan paham akan peran tersebut, sedangkan 4,3% menyatakan ragu-ragu, dan 9,5% menyatakan ketidakpahamannya.





Gambar 1. Persepsi Guru PAI SD terhadap Kurikulum Merdeka

Keterangan:

Aspek 1 : Pemahaman tentang Kurikulum Merdeka

Aspek 2 : Kesetujuan tentang penerapan Kurikulum Merdeka

Aspek 3 : Penetapan kebijakan sekolah tentang implementasi Kurikulum Merdeka

Aspek 4 : Pemahaman terhadap perubahan dalam Kurikulum Merdeka

Aspek 5 : Pemahaman terhadap peran Kurikulum Merdeka terhadap minat belajar siswa

Aspek 6 : Pemahaman terhadap peran Kurikulum Merdeka terhadap kompetensi Abad 21

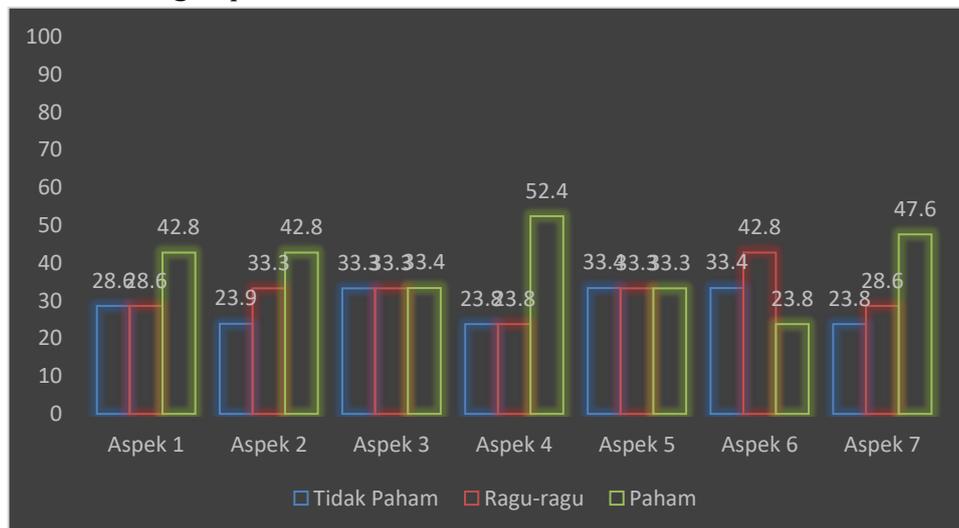
Dari hasil penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa persepsi awal guru PAI sekolah dasar negeri dan swasta se-Kecamatan Turi cukup positif dalam penerimaan perubahan, dalam hal ini perubahan dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka. Rasa optimis ini diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan pembaharuan, khususnya dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Secara singkat, rasa optimisme dalam menyambut perubahan ini sudah menghilangkan satu dari problematika implementasi Kurikulum Merdeka, yakni sulitnya mengubah *mindset* atau kebiasaan lama dalam penerapan pada pembelajaran (Rahayu, dkk., 2022).

Persepsi Guru PAI tentang Pemahaman Komponen Kurikulum Merdeka

Komponen Kurikulum Merdeka terdiri dari 1) Profil pelajar Pancasila; 2) Capaian Pembelajaran; 3) Struktur kurikulum; dan 4) Prinsip pembelajaran dan asesmen. Dalam penelitian, empat komponen ini diturunkan ke dalam tujuh aspek, yakni: 1) Pemahaman guru tentang capaian pembelajaran PAI dan Budi Pekerti; 2) Kemampuan guru dalam menganalisis capaian pembelajaran (CP) ke dalam tujuan pembelajaran (TP); 3) Kemampuan menurunkan TP ke dalam alur tujuan pembelajaran (ATP); 4) Kemampuan mengorganisir pembelajaran; 5) Kemampuan menyusun modul ajar/RPP; 6) Kemampuan dalam memahami Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila; dan 7) Kemampuan melakukan asesmen.

Dari penelitian yang telah dilakukan terdapat hasil pada gambar 2 yang terurai sebagai berikut: dalam hal pemahaman capaian pembelajaran PAI dan Budi Pekerti jenjang SD, hanya 42,8% guru yang memahami capaian pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Artinya, dari 21 GPAI SD di Kecamatan Turi tidak lebih dari setengahnya yang memahami apa itu capaian pembelajaran. Pada aspek penurunan capaian pembelajaran (CP) ke dalam tujuan pembelajaran (TP), prosentase kemampuan guru masih sama, yakni hanya 42,8%. Sedangkan untuk kemampuan guru menurunkan TP ke dalam ATP, guru masih berada pada prosentase 33,4% atau dengan kata lain, baru sepertiga guru yang mampu menurunkan TP ke ATP. Ada kemampuan guru yang terbilang cukup tinggi dalam komponen Kurikulum Merdeka, yakni kemampuan guru dalam mengorganisir pembelajaran. Kemungkinan ini disebabkan tidak banyak perubahan antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka pada aspek ini.

Dalam aspek pemahaman Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), kemampuan guru PAI masih di bawah sepertiga. Hanya 23,8% guru yang memahami P5. Ini baru pada level pemahaman. Belum dilakukan penelitian tentang kemampuan guru dalam pelaksanaan P5. Adapun pada aspek terakhir, yakni pelaksanaan asesmen, hampir separuh guru sudah melakukan asesmen Kurikulum Merdeka sesuai dengan pedoman.



Gambar 2. Persepsi Guru PAI tentang Pemahaman komponen Kurikulum Merdeka

Keterangan:

Aspek 1 : Pemahaman tentang capaian pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka

Aspek 2 : Kemampuan guru dalam menganalisis capaian pembelajaran (CP) ke dalam tujuan pembelajaran (TP)

Aspek 3 : Kemampuan menurunkan TP ke dalam alur tujuan pembelajaran (ATP)

Aspek 4 : Kemampuan mengorganisir pembelajaran

Aspek 5 : Kemampuan menyusun modul ajar/RPP

Aspek 6 : Kemampuan dalam memahami Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Aspek 7 : Kemampuan melakukan asesmen

Dari hasil penelitian tersebut diperoleh data tentang pemahaman guru atas capaian pembelajaran dan struktur Kurikulum Merdeka masih di bawah 50% dengan pengecualian pelaksanaan pengorganisasian pembelajaran pada Kurikulum Merdeka. Pemahaman komponen inti dalam struktur Kurikulum Merdeka seperti capaian pembelajaran (CP), tujuan pembelajaran (TP), alur tujuan pembelajaran (ATP), penyusunan modul ajar/RPP, dan asesmen, serta pemahaman tentang pelaksanaan P5 memang menjadi kunci dalam Kurikulum Merdeka (BSKAP, 2022b). Guru yang hendak mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran harus memahami komponen-komponen ini.

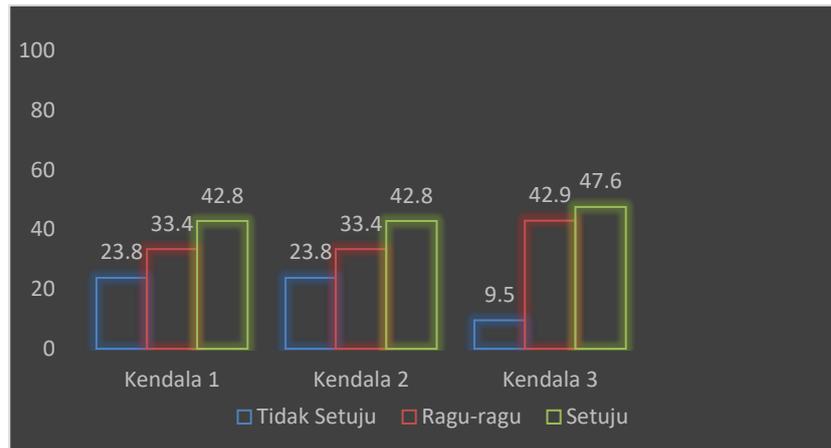
Fakta ini bisa dimaklumi karena memang pelaksanaan implementasi Kurikulum Merdeka baru dilaksanakan dalam rentang satu semester. Beberapa penelitian lain juga menyebutkan bahwa salah satu permasalahan utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka adalah kemampuan SDM, dalam hal ini guru dalam memahami konsep-konsep kunci Kurikulum Merdeka. Ini dikarenakan belum semua guru mengikuti workshop implementasi Kurikulum Merdeka (Dewi & Astuti, 2022). Belum semua guru maupun calon guru bisa membaca CP dengan baik, belum bisa menyusun TP (tujuan pembelajaran dari CP (capaian pembelajaran) yang ada, belum bisa menyusun ATP (alur tujuan pembelajaran) dari TP, dan juga kesulitan mengembangkan modul ajar (Rindayati, E., Putri, C. A. D., & Damariswara, R., 2022).

Persepsi Guru PAI tentang Kendala dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Rendahnya prosentase pemahaman guru PAI tentang komponen Kurikulum Merdeka mengindikasikan adanya hambatan atau kendala yang dihadapi guru PAI dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SD baik negeri maupun swasta se-Kecamatan Turi. Kesulitan yang paling banyak adalah pada pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (23,8%), disusul kemudian kemampuan menyusun RPP/modul ajar (33,3%) dan juga tentang pemahaman atas penurunan TP ke dalam ATP (33,4%).

Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (BSKAP, 2022c). Namun pada kenyataannya, guru masih belum memahami alur pelaksanaan P5 tersebut.

Dalam hal ini, beberapa kendala yang dihadapi oleh guru PAI tergambar pada gambar 3 berikut:



Gambar 3. Kendala Guru PAI dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Keterangan:

Kendala 1 : Keterbatasan pemahaman guru tentang komponen Kurikulum Merdeka

Kendala 2 : Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung IKM

Kendala 3 : Keterbatasan IT guru

Dengan data di atas, kendala terbesar guru ada pada keterbatasan kemampuan IT guru (47,6%) yang memang menjadi sumber dalam pelaksanaan Kurikulum merdeka, seperti pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar, Rumah Belajar, serta penggunaan media IT untuk membuat produk/ konten pembelajaran antara lain penggunaan video pendidikan, pembelajaran audio, multimedia interaktif, dan munculnya Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) (<https://gurudikdas.kemdikbud.go.id>). Sedangkan keterbatasan sarana dan juga pemahaman guru terhadap konsep-konsep Kurikulum Merdeka masing-masing berada pada prosentase 42,8%.

Dengan penemuan ini, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka bisa bersifat teknis, yakni sarana dan prasarana, dan bisa juga bersifat nonteknis, yakni keterbatasan pemahaman guru terhadap konsep-konsep utama Kurikulum Merdeka dan keterbatasan guru dalam menggunakan IT. Kendala-kendala yang dihadapi guru partisipan merupakan masalah krusial, karena kendala yang dihadapi berkaitan dengan aspek penting penerapan Kurikulum Merdeka, seperti keterbatasan pemahaman atas CP, TP, ATP, dan penyusunan RPP, pelaksanaan proses pembelajaran, serta proses penilaian. Oleh karena itu, program pendampingan terhadap para guru yang dilaksanakan dengan rutin dapat dijadikan sebagai sebuah solusi untuk mengatasi ketidakefektifan pelatihan Kurikulum Merdeka yang telah dilaksanakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Para guru partisipan mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia, namun tidak semua para guru partisipan dalam penelitian ini dapat memahami dengan baik konsep-konsep utama dalam Kurikulum Merdeka dengan



baik. Penemuan ini menjadi catatan penting baik bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, koordinator wilayah bidang pendidikan, dan juga dinas pendidikan setempat khususnya, juga pihak-pihak lain yang terkait pada umumnya. Sejatinya, Kementerian Pendidikan sudah banyak memberikan sosialisasi baik melalui dinas pendidikan maupun melalui Platform Merdeka Mengajar yang bisa diakses secara bebas oleh guru. Namun pada kenyataannya masih banyak guru yang masih belum memahami konsep dan aspek utama dalam Kurikulum Merdeka. Hal ini disebabkan karena guru mengalami kendala dalam memahami konsep-konsep tersebut, sarana dan prasarana yang terbatas, juga kendala keterbatasan kemampuan IT guru dalam mengakses platform-platform yang mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Temuan ini menunjukkan bahwa program pendampingan intensif dan berkala terhadap para guru PAI perlu diterapkan guna membantu para guru untuk dapat memahami dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dalam kegiatan belajar mengajar.

Adapun saran untuk peneliti berikutnya, diharapkan mampu mengembangkan penelitian pada implementasi Kurikulum Merdeka, terutama pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Penelitian juga bisa dikembangkan pada pendidikan jenjang lainnya sehingga bisa memberi manfaat yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainia, Dela Khoirul. (2020). Merdeka Belajar dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya Bagi Pengembangan Pendidikan Karakter. *Jurnal Filsafat Indonesia Undiksha*, Vol 3 No. 3, 95-101. <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i3.24525>.
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022a). *Kajian Akademik: Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran*.
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022b). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen*.
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022c). *Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*.
- Basar, A. M. . (2021). Problematika Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi Covid-19 : (Studi Kasus di SMPIT Nurul Fajri – Cikarang Barat – Bekasi). *Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(1), 208–218. <https://doi.org/10.51276/edu.v2i1.112>.
- Cerelia, dkk. (2021). *Learning Loss* Akibat Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia. Pada *Prosiding Nasional Departemen Statistika FMIPA Unpad*. Bandung: Universitas Padjajaran.

Daga, A. T. (2021). Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(3), 1075–1090. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i3.1279>.

Dewi dan Astuti. (2022). Hambatan Kurikulum Merdeka Di Kelas IV SDN 3 Apuan. *Jurnal Pendidikan Dasar Rare Pustaka*, Vol 4 No 2. <https://jurnal.markandeyabali.ac.id/index.php/rarepustaka/article/view/128>.

Fatmiyati, Nina. (2022). Persepsi Guru Kelas Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar Di SDN 140 Seluma Pada Materi Ma-tematika. *Jurnal Pendidikan Tematik*, Vol 3 No. 3. <https://siducat.org/index.php/jpt/article/view/600>.

Fitrotun, Naili Nur, Moh. Miftakhul Huda, Achmad Ali Fikri. (2020). Persepsi Calon Guru PAI terhadap Merdeka Belajar. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*; Vol. 15, No.2, 236-246. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v15i2.3387>.

<https://gurudikdas.kemdikbud.go.id/news/teknologi-dalam-transformasi-pembelajaran-kurikulum-merdeka>. Diakses pada Hari Senin, 20 Februari 2023.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus.

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak.

Nugraha, Tono Supriatna. (2022). Kurikulum Merdeka untuk Pemulihan Krisis Pembelajaran. *Inovasi Kurikulum* 19 (2), 251-262. <https://doi.org/10.17509/jik.v19i2.45301>.

Paparan Kemdikbudristek. (2021). Merdeka Belajar Episode Kelima Belas; Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar.

Pendi, Yulius Obeta. (2020). Merdeka Belajar yang Tercermin dalam Kompetensi Profesional Guru Bahasa Inggris SMP Negeri 01 Sedayu. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pendidikan “Implementasi Merdeka Belajar Berdasarkan Ajaran Tamansiswa” di Hotel Syahid Raya, 7 Maret 2020, vol. 1, no. 1. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/semnas2020>.

Rahayu, Restu, dkk. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basicedu*. Vol 6 No 4. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3237>.

Rahman, dkk. (2021). Persepsi Guru Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Penyederhaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Di MTs Negeri 1 Manado. *Journal of Islamic Education: The Teacher of Civilization*. Vol 2, No 1. <http://dx.doi.org/10.30984/jpai.v2i1.1708>.

Rindayati, E. , Putri, C. A. D. . , & Damariswara, R. . . (2022). Kesulitan Calon Pendidik dalam Mengembangkan Perangkat Pembelajaran pada Kurikulum



- Merdeka. *PTK: Jurnal Tindakan Kelas*, 3(1), 18-27.
<https://doi.org/10.53624/ptk.v3i1.104>.
- Saputra, Dendi Wijaya dan Muhamad Sofian Hadi. Persepsi Guru Sekolah Dasar Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu tentang Kurikulum Merdeka. *Holistika : Jurnal Ilmiah PGSD*. Volume 6 No. 1.
<https://doi.org/10.24853/holistika.6.1.28-33>.
- Sibagariang, D. ., Sihotang, H. ., & Murniarti, E. (2021). Peran Guru Penggerak Dalam Pendidikan Merdeka Belajar di Indonesia. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 14(2), 88-99. <https://doi.org/10.51212/jdp.v14i2.53>.
- Susiani, Ika Wahyu. Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Darur Rohmah Gandu Mlarak Ponorogo. *Proceeding: International Conference on Islamic Studies (ICIS) IAIN Ponorogo*, [S.l.], p. 296-306, nov. 2022. ISSN 2656-7229. Available at:
<<https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/icis/article/view/805>>.
doi: <https://doi.org/10.21154/icis.v0i0.805>.
- Yulianti, Marsela, Divana Leli Anggraini, Siti Nurfaizah, & Anjani Putri Belawati Pandiangan. (2022). Peran Guru dalam Mengembangkan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1(3), 290–298. Retrieved from <http://www.putrapublisher.org/ojs/index.php/jipsi/article/view/53>.
- Yusuf, M dan Witrialail Arfiansyah. (2021). Konsep “Merdeka Belajar” dalam Pandangan Filsafat Konstruktivisme. *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*. Vol. 7, No. 2. <https://doi.org/10.53627/jam.v7i2.3996>.